

MENELAAH KONFLIK ZONA ABU-ABU (GREYZONE CONFLICT) DI LAUT CHINA SELATAN, STUDI KASUS BENTROKAN PATROLI MARITIM CHINA DAN PHILIPINA

Agus Haryanto

Pusjianmar Seskoal

Email: agusxlv@gmail.com

<http://doi.org/10.52307/jmi.v9i2.185>

Abstrak

Konflik zona abu-abu di Laut Cina Selatan mencerminkan dinamika geopolitik yang kompleks dengan melibatkan strategi diplomasi, soft power, dan modernisasi militer oleh Cina untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan. Meski upaya ini sering mendapat kritik, Cina terus berupaya mempertahankan kepentingannya, termasuk melalui reformasi pertahanan dan penggunaan taktik paramiliter. Konflik ini memicu respons dari negara-negara seperti Philipina, Vietnam, dan Malaysia, yang memperkuat kerja sama multilateral maupun minilateral untuk menjaga stabilitas kawasan. Upaya ASEAN dan Cina untuk meredam ketegangan melalui Deklarasi Perilaku (DoC) dan Kode Etik (CoC) menunjukkan pentingnya diplomasi dalam penyelesaian konflik, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan. Hubungan Philipina dan Cina, yang sering kali kontroversial, melibatkan pengaruh besar dari Amerika Serikat sebagai pemain utama dalam menjaga keseimbangan strategis di kawasan.

Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami konflik zona abu-abu sebagai pendekatan untuk mengelola sengketa tanpa eskalasi terbuka. Melalui analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi stabilitas kawasan maritim dan implikasinya terhadap lingkungan strategis negara-negara di Indo-Pasifik. Upaya dialog dan negosiasi yang melibatkan ASEAN, Cina, dan aktor global lainnya tetap menjadi kunci dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas regional.

Kata kunci : konflik abu-abu, greyzone conflict, China, Philipina, Laut China Selatan, sengketa wilayah laut.

Abstract

The grey zone conflict in the South China Sea reflects complex geopolitical dynamics involving China's strategy of diplomacy, soft power and military modernization to

strengthen its influence in the region. While these efforts are often criticized, China continues to defend its interests, including through defense reforms and the use of paramilitary tactics. The conflict triggered responses from countries such as the Philippines, Vietnam and Malaysia, which strengthened multilateral and minilateral cooperation to maintain regional stability. ASEAN and China's efforts to de-escalate tensions through the Declaration of Conduct (DoC) and Code of Conduct (CoC) demonstrate the importance of diplomacy in conflict resolution, although implementation still faces challenges. The Philippines-China relationship, which is often contentious, involves heavy influence from the United States as a major player in maintaining the strategic balance in the region.

This research highlights the importance of understanding gray zone conflicts as an approach to managing disputes without open escalation. Through qualitative descriptive analysis, it explores the internal and external factors that influence the stability of the maritime region and its implications for the strategic environment of countries in the Indo-Pacific. Dialogue and negotiation efforts involving ASEAN, China and other global actors remain key in creating regional peace and stability.

Keywords: gray conflict, greyzone conflict, China, Philippines, South China Sea, maritime territorial dispute.

PENDAHULUAN

Menaklukkan musuh tanpa bertempur adalah seni tertinggi dalam perang, demikian kata Sun Tzu. Prinsip itu pulalah yang saat ini mendasari kebijakan luar negeri dan pertahanan China, salah satu negara dengan kekuatan militer terbesar di era ini. Prinsip tersebut terlihat kontradiktif dengan apa yang menjadi kebijakan pertahanannya. Di dalam buku putih pertahanan yang berjudul *“China’s National Defense in the New Era”* yang diterbitkan tahun 2019

China menegaskan memiliki ciri khas pertahanan nasional menyesuaikan era baru yaitu tidak ingin menjadi sebuah negara yang sedang mencari hegemoni, tidak berniat untuk berekspansi atau mencari pengaruh terhadap negara lain dan mencintai perdamaian dan berkomitmen untuk mempromosikannya. China juga menyadari bahwa meskipun suatu negara bisa menjadi kuat, perang akan membawa kehancuran serta tidak ingin menimpakan penderitaan akibat perang kepada negara lain.

Realitas yang ada, prinsip-prinsip perdamaian di atas tidak serta merta menjadikan China sebuah negara yang tidak mengutamakan pembangunan dan penggunaan kekuatan militer serta hanya semata-mata mengandalkan cara-cara damai, diplomasi dan soft power untuk mendukung kebijakan luar negeri dan kepentingan nasionalnya. Sebaliknya China justru menjadikan kebijakan pertahanan menjadi salah satu prioritas utama dan ingin menjadikan kekuatan militernya sebagai yang terkuat di dunia. Visi tersebut dimulai dari tahun 2015 ketika Presiden Xi Jinping mengadakan pertemuan penting di Beijing untuk meluncurkan "reformasi pertahanan nasional dan angkatan bersenjata yang paling luas dan mendalam" sejak tahun 1949.¹ Peningkatan kemampuan sistem pertahanan terus dilakukan dengan memajukan pengembangan mekanis maupun informasi secara terpadu dan smart defense untuk memenuhi kebutuhan yang mampu mendukung kepentingan nasionalnya. Dalam aspek penggunaan kekuatan, China juga telah mengerahkan lebih dari 4.600 kapal

patroli keamanan maritim dan 72.000 operasi perlindungan hak dan penegakan hukum sesuai kepentingan nasional mereka².

Salah satu kepentingan dan kebijakan politik dan maritim utama China tentu saja klaim terhadap hampir sebagian wilayah Laut China Selatan. Sebuah kawasan perairan yang memiliki nilai strategis sangat tinggi karena kaya akan sumber daya alam dan menjadi jalur perdagangan dunia. China mendasarkan klaimnya atas Laut China Selatan pada peta-peta kuno dan catatan sejarah yang menunjukkan bahwa nelayan China telah beroperasi di wilayah tersebut selama berabad-abad. Namun, klaim ini seringkali dipertanyakan oleh negara-negara tetangga yang juga memiliki klaim historis atas wilayah yang sama sehingga sampai saat ini sengketa tersebut masih terjadi dan melibatkan negara-negara di kawasan tersebut seperti Vietnam, Malaysia, Jepang termasuk Philipina yang mempunyai klaim atas beberapa pulau.

Wilayah Philipina yang terdampak oleh klaim China di Laut Cina Selatan,

¹ <https://english.news.cn/20240801/fdad47e7ba13457a85589600a686de7f/c.html>, diakses tanggal 19 Desember 2024

² China's National Defense in the New Era, Juli 2029 hal. 11

yang disebut Philipina sebagai Laut Philipina Barat, meliputi Kepulauan Spratly, Scarborough Shoal (Panatag Shoal/Bajo de Masinloc), dan sebagian besar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Philipina, termasuk wilayah kaya sumber daya seperti Recto Bank (Reed Bank). China mengklaim wilayah ini berdasarkan Nine-Dash Line, meskipun klaim tersebut telah dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Arbitrase Internasional pada 2016. Dampaknya meliputi konflik perikanan, gangguan eksplorasi sumber daya alam, dan ketegangan militer akibat kehadiran kapal penjaga pantai dan militer China di wilayah yang secara geografis dekat dengan Philipina. Meski demikian, China tetap menolak keputusan arbitrase, sehingga wilayah ini terus menjadi titik panas geopolitik di kawasan Asia Tenggara. Ketegangan-ketegangan yang terjadi di kawasan yang saling tumpang tindih klaim tersebut sampai saat ini masih terus terjadi, meski beruntungnya masing-masing pihak masih bisa menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang memicu penggunaan kekuatan militer secara luas sehingga menjadi sebuah kawasan abu-abu (*greyzone*) karena negara-negara yang berkepentingan

masih secara sadar akan berpikir dampak yang terjadi jika eskalasi politik dan militer ini menjadi buruk.

The 2020 Defence Strategic Update mendeskripsikan zona abu-abu sebagai, "kegiatan yang dirancang untuk memaksa suatu negara namun dengan tetap berupaya menghindari konflik militer, penggunaan pasukan paramiliter, militerisasi terhadap fitur-fitur sengketa, eksploitasi pengaruh, operasi campur tangan, dan pemaksaan dengan cara perdagangan maupun ekonomi". Konflik *greyzone* berada pada kondisi perdamaian dan perang. Taktik, konfrontasi, dan konflik zona abu-abu terkait dengan penggunaan metode non-militer untuk mencapai tujuan politik. Kegiatan ini dapat meliputi intervensi dalam politik dan pemilu, ancaman dan serangan siber, pemaksaan ekonomi, penggunaan proksi, dan berbagai tindakan lainnya, termasuk tindakan militer. Menurut Andrew Dowse dan Sascha-Dominik Bachmann, strategi ini memanfaatkan ketidakjelasan yang ada di hukum internasional, ambiguitas antara tindakan dan tanggung jawab, atau karena akibat dari tindakan tersebut tidak dapat direspon oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penulisan dan analisis kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana data diperoleh dan merujuk pada informasi yang bersumber dari berbagai referensi, berita-berita, laporan-laporan, buku-buku dan naskah-naskah elektronik serta website yang ada dunia maya. Artikel ini berusaha mengeksplorasi teori-teori yang terkait dengan *greyzone conflict*, fakta-fakta dan kejadian insiden yang melibatkan kekuatan laut China dan Philipina, analisis kualitatif terhadap dampak dari insiden tersebut dalam hal pengaruhnya bagi stabilitas keamanan di laut China Selatan, serta pengaruhnya bagi perkembangan lingkungan strategis kawasan khususnya Indonesia sebagai negara maritim.

PEMBAHASAN

1. Fakta-fakta kejadian perselisihan maritim antara China dan Philipina. Beberapa kejadian berbau kekerasan namun belum bisa dikatakan sebagai konflik militer antara kedua pasukan patroli maritim kedua pihak sebagaimana dilansir dari berbagai sumber di antaranya sebagai berikut:

a. Pada hari Senin, 13 Pebruari 2023 Pasukan Penjaga Pantai Philipina menuding kapal penjaga pantai Cina dua kali menembak kapal penjaga pantai mereka dengan “sinar laser”. Insiden ini menurut Philipina pada Senin 13 Februari 2023, menyebabkan kebutaan sementara petugas penjaga pantai Philipina.

b. Pada tanggal 8 Agustus 2023 Penjaga pantai China menembakkan meriam air ke kapal-kapal penjaga Pantai Philipina yang sedang mengawal kapal yang membawa makanan, air, bahan bakar, dan pasokan lainnya untuk personel militer Philipina yang ditempatkan di Second Thomas Shoal di Kepulauan Spratly.³

c. Pada 10 Desember 2023, Kapal penjaga pantai China dan kapal Milisi Maritim China secara terpisah dilaporkan bertabrakan dengan kapal penjaga pantai Philipina dan kapal militer pemasok logistik di Beting Ayungin atau Karang Second Thomas di dekat Kepulauan Spratly.⁴

³ <https://www.voaindonesia.com/a/filipina-tuding-garda-pantai-china-tembakkan-meriam-air-ke-kapal-kapalnya-7213515.html>, diakses tanggal 20 Desember 2024.

⁴ <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/10/22/kapal-bertabrakan-china-filipina-saling-tuding>, diakses tanggal 20 Desember 2024.



Foto yang drills Angkatan Bersenjata Philipina, Minggu (22/10/2023) ini menunjukkan kapal Milisi Maritim China (atas) di dekat kapal Penjaga Pantai Philipina BRP Cabra saat menuju Karang Second Thomas atau warga Philipina mengenalnya sebagai Beting Ayungin di wilayah Laut China Selatan yang disengketakan. (Sumber: Kompas.com)

d. Pada 5 Maret 2024: Kapal Unaizah May 4 milik Manila rusak akibat serangan meriam oleh Penjaga Pantai China saat melakukan pengiriman di Laut China Selatan. Kondisi ini menyebabkan sebanyak 4 awak kapal Philipina terluka.⁵

e. Pada 30 April 2024: Satu kapal patroli dan kapal nelayan Philipina rusak usai mendapat serangan meriam air dari kapal Penjaga Pantai Tiongkok di Perairan Scarborough.

f. Pada 2 Juni 2024: Kapal Philipina yang membawa pasokan ke Sierra Madre

ditenggelamkan oleh China usai melalui Second Thomas Shoal.

g. Pada 17 Juni 2024: Terjadi bentrok antara Penjaga Pantai China dengan Philipina di Second Thomas Shoal yang sebabkan 3 orang petugas Philipina terluka.

Fakta-fakta di atas hanya sebagian contoh perselisihan, bentrokan dan gesekan yang terjadi di kawasan saling tumpang tindih klaim dan meskipun yang terlibat adalah kapal dan personel di lapangan, namun memiliki dampak mengganggu hubungan bilateral kedua negara maupun pergaulan internasional secara umum.

Kejadian-kejadian yang melibatkan patroli maritim China dan Philipina di kawasan sengketa terlihat seperti insiden biasa, namun jika melihat dari perspektif hubungan internasional maka kejadian tersebut jika dibiarkan berlarut-larut tidak menutup kemungkinan akan berpotensi meningkatkan eskalasi konflik ke arah yang lebih serius, apalagi jika mulai melibatkan negara-negara dengan kekuatan maritim besar seperti Amerika Serikat, Eropa dan sekutunya. Hal tersebut diperparah dengan penerbitan Undang-undang baru China, yang

⁵ <https://tirto.id/kronologi-china-filipina-bentrok-di-laut-china-selatan-terbaru-gZQ6>, diakses tanggal 19 Desember 2024

mengizinkan penjaga pantainya menyita kapal asing “yang secara ilegal memasuki perairan teritorial China” dan menahan kru asing hingga 60 hari. Undang-undang ini juga menyebutkan bahwa penjaga pantai China dapat menembak kapal asing jika diperlukan.

2. Respon negara-negara regional dan Internasional.

Amerika Serikat sebagai negara utama pendukung Philipina jelas tidak tinggal diam dengan situasi yang terjadi di kawasan tersebut, apalagi kepentingan strategis Amerika di Indo-Pasifik demikian besar. Wakil Menteri Luar Negeri AS Kurt Campbell membahas tindakan China dengan Maria Theresa Lazaro, mitranya dari Philipina, melalui panggilan telepon. Mereka sepakat tindakan China “membahayakan perdamaian dan stabilitas regional,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller. Campbell menegaskan kembali Perjanjian Pertahanan Bersama tahun 1951, yang mengharuskan Washington dan Manila saling membantu dalam konflik besar, “mencakup serangan bersenjata terhadap angkatan bersenjata Philipina, kapal publik, atau pesawat, termasuk penjaga pantainya, di mana

saja di Laut China Selatan,” menurut Miller.⁶

China sendiri menganggap hubungannya dengan Philipina saat ini berada di persimpangan jalan alias di ‘area abu-abu’ dan belum dapat ditentukan akan mengarah kemana, karena masing-masing pihak tidak mengakui klaim satu sama lain. Sebuah hal yang wajar jika menyangkut kepentingan politik dan keutuhan wilayah suatu negara. Tiongkok meminta Philipina untuk “mempertimbangkan secara serius masa depan” hubungan yang saat ini berada di “persimpangan jalan.” tersebut dan belum adanya titik temu jalan mana yang akan ditempuh. Pernyataan ini diterbitkan oleh People's Daily, surat kabar Partai Komunis Tiongkok Senin, 9 September 2024, di tengah ketegangan atas Laut China Selatan.⁷

Di satu kesempatan di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-27 ASEAN-China di Vientiane, Laos China menyatakan ingin menyelesaikan permasalahan dengan Philipina dengan cara-cara

⁶ <https://www.kompas.tv/internasional/516103/washington-peringatkan-beijing-as-siap-bela-filipina-usai-bentrokkan-di-laut-china-selatan>, diakses tanggal 20 Desember 2025

⁷ <https://www.metrotvnews.com/read/KXyCAG6X-tiongkok-sebut-hubungan-dengan-filipina-di-persimpangan-jalan-atas-laut-china-selatan>, diakses tanggal 20 Desember 2024

damai. Perdana Menteri (PM) China Li Qiang menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga situasi kondusif kawasan Laut China Selatan. "Sangat penting bagi kami komitmen untuk menjaga kedaulatan dan kepentingannya, dan saya ingin menekankan bahwa kita semua berkomitmen untuk menyelesaikan perbedaan kita melalui dialog dan konsultasi," ucap Li Qiang dalam forum KTT tersebut. China pun berharap agar setiap negara menghormati Code of Conduct (COC) atau Kode Etik di Laut China Selatan. Sehingga stabilitas dan keamanan kawasan tetap terjaga.⁸



Kapal nelayan Philipina berhadapan dengan kapal Penjaga Pantai China (latar belakang) di Laut China Selatan, 16 Mei 2024. (Sumber: Kompas)

Keinginan aktor utama di laut China Selatan untuk menyelesaikan sengketa dan perselisihan dengan jalan damai dan dialog menjadi sebuah sinyalemen dan harapan bahwa ke depan stabilitas keamanan dan keamanan maritim yang ada di laut China Selatan akan menuju ke arah yang lebih baik. Meski demikian, pernyataan tersebut jelas belum mencukupi memadai untuk menjadi jaminan dari tujuan dan keinginan tersebut.

3. Upaya penyelesaian konflik.

Konflik di Laut Cina Selatan yang melibatkan China sebagai aktor utama berhadapan dengan negara-negara yang ada di sekelilingnya termasuk Philipina yang paling menonjol saat ini dapat dikatakan masih belum terselesaikan secara tuntas. ASEAN dan China telah lama melakukan berbagai upaya untuk menangani permasalahan ini. Salah satu langkah penting adalah penandatanganan Deklarasi tentang Tata Berperilaku (*Declaration on Conduct/DoC*) di Laut Cina Selatan pada tahun 2002. Deklarasi ini menekankan pentingnya menghormati hukum

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-7580944/china-pastikan-konflik-laut-china-selatan-diselesaikan-dengan-dialog, diakses tanggal 20 Desember 2012>

internasional, menjaga perdamaian, dan mencegah terjadinya konflik di kawasan tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2011, ASEAN dan China menyepakati pembentukan Kode Etik Regional (Regional Code of Conduct/CoC) di Laut Cina Selatan.

PENUTUP

Konflik zona abu-abu (greyzone conflict) di Laut Cina Selatan mencerminkan kompleksitas geopolitik yang melibatkan pengaruh Cina, diplomasi regional, dan kepentingan strategis global. Cina memanfaatkan pendekatan diplomasi, soft power, dan modernisasi militer untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan, meskipun kerap menuai kritik. Di sisi lain, negara-negara seperti Philipina, Vietnam, dan Malaysia merespons dengan upaya kerja sama multilateral maupun minilateral untuk menjaga stabilitas dan melindungi kepentingan mereka.

Pembaharuan Strategi Pertahanan 2020 menyoroti pentingnya memahami konflik zona abu-abu sebagai upaya untuk mengelola sengketa tanpa eskalasi terbuka, menggunakan taktik paramiliter

dan eksploitasi hukum internasional. ASEAN dan Cina berupaya meredam ketegangan melalui deklarasi dan kode etik, seperti DoC (2002) dan CoC (2011), meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan.

Hubungan Philipina dan Cina tetap menjadi isu sensitif, dengan AS turut memainkan peran strategis dalam menyeimbangkan dinamika regional. Upaya dialog dan negosiasi, termasuk dalam kerangka ASEAN, mencerminkan pentingnya kerja sama untuk mencapai stabilitas dan perdamaian di kawasan maritim Indo-Pasifik.

Indonesia sebagai sebuah negara besar yang memiliki potensi dan kepentingan strategis kawasan seyognya mampu memberikan kontribusi lebih untuk memfasilitasi proses penyelesaian konflik menggunakan cara-cara damai dan diplomasi. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menyelenggarakan dialog-dialog yang melibatkan negara-negara yang berkepentingan sehingga stabilitas dan perdamaian global dan regional dapat senantiasa terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Afp. (2023, August 6). Philipina Tuding Garda Pantai China Tembakkan Meriam Air ke Kapal-kapalnya. *VOA Indonesia*.
<https://www.voaindonesia.com/a/Philipina-tuding-garda-pantai-china-tembakkan-meriam-air-ke-kapal-kapalnya-/7213515.html>
- Anwar, L. A. (2024b, June 4). Insiden Senjata Philipina-China Nyaris Berujung Konflik di Laut China Selatan. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2024/06/04/insiden-senjata-Philipina-china-nyaris-berujung-konflik-di-laut-china-selatan>.
- Bimo, E. S. (2024, June 18). Washington Peringatkan Beijing, AS Siap Bela Philipina usai Bentrokan di Laut China Selatan. *Kompas.tv*. <https://www.kompas.tv/internasional/516103/washington-peringatkan-beijing-as-siap-bela-Philipina-usai-bentrokan-di-laut-china-selatan>
- Ikhsanudin, A. (2024, October 10). China Pastikan Konflik Laut China Selatan Diselesaikan dengan Dialog. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-7580944/china-pastikan-konflik-laut-china-selatan-diselesaikan-dengan-dialog>.
- Kane, T. M. (2016). *Chinese Grand Strategy and Maritime Power*. <https://doi.org/10.4324/9780203815144>
- Nababan, H. F. (2023, October 22). Kapal Bertabrakan, China-Philipina Saling Tuding. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/10/22/kapal-bertabrakan-china-Philipina-saling-tuding>
- Nancy, Y., & Raditya, I. N. (2024, June 21). Kronologi China & Philipina Bentrok di Laut China Selatan Terbaru. *tirto.id*. <https://tirto.id/kronologi-china-Philipina-bentrok-di-laut-china-selatan-terbaru-gZQ6>
- Pusat Analisis Keparlemenan, P. A. K., & Badan Keahlian DPR RI, B. K. D. R. (2023). Ketegangan Philipina dan China di Laut China Selatan Serta Upaya Asean Dalam Mengatasinya. In *Pusat Analisis Keparlemenan*. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-24-II-P3DI-Desember-2023-238.pdf
- Robertson, A. (2022, June 18). *What is Grey Zone confrontation and why is it important?* <https://cove.army.gov.au/article/what-grey-zone-confrontation-and-why-it-important>. Retrieved December 19, 2024, from <https://cove>.

army.gov.au/article/what-grey-zone-confrontation-and-why-it-important

Rosdalina, I. (2024, June 18). Kronologi Perseteruan Philipina dan Cina atas Laut Cina Selatan. *Tempo*. <https://www.tempo.co/internasional/kronologi-perseteruan-Philipina-dan-cina-atas-laut-cina-selatan-48208>.

Strangio, S. (2024, June 22). China and the Philippines Inch Closer to Conflict in the South China Sea. *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2024/06/china-and-the-philippines-inch-closer-to-conflict-in-the-south-china-sea/>

Tempo.Co, & Planasari, S. (2023, February 13). Philipina Tuding Kapal Cina Tembak Sinar Laser di Laut Cina Selatan. *Tempo*. [https://www.tempo.co/internasional/Philipina-](https://www.tempo.co/internasional/Philipina-tuding-kapal-cina-tembak-sinar-laser-di-laut-cina-selatan-219479)

tuding-kapal-cina-tembak-sinar-laser-di-laut-cina-selatan-219479

The State Council Information Office of the People's Republic of China. (2019). *China's National Defense in the New Era* (1st ed.). Foreign Languages Press Co. Ltd. 24 Baiwanzhuang Road, Beijing 100037, China Distributed by China International Book Trading Corporation 35 Chegongzhuang Xilu, Beijing 100044, China P.O. Box 399, Beijing, China. <http://www.xinhuanet.com/english/download/whitepaperonnationaldefenseinnewera.doc>

Xi Focus: Building world-class armed forces for China. (n.d.). <https://english.news.cn/20240801/fdad47e7ba13457a85589600a686de7f/c.html>